

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Peran MMP dalam kontruksi sosial dapat dilihat melalui 3 (tiga) proses yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Peran MMP dalam Proses Eksternalisasi Identitas dapat dianalisis melalui proses Awal Mula Pembentukan MMP di Era Otonomi Khusus, adaptasi nilai-nilai budaya dan aktifisme sejarah. Studi ini menunjukkan bahwa ormas-ormas di tanah Papua membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Majelis Muslim Papua (MMP) yang bertujuan untuk menjaga perdamaian antar umat beragama. MMP berusaha dalam menyikapi persoalan-persoalan kemanusiaan di Papua yang juga didukung dengan adanya kebijakan otonomi khusus bagi kemajuan organisasi MMP.

Majelis Muslim Papua memiliki peran yang strategis dalam mengkonsolidasikan kelompok-kelompok Islam di Papua. Berdirinya MMP lebih didorong oleh keinginan sekelompok elite Muslim melakukan komunikasi secara kelembagaan dengan pemerintah daerah. Meskipun awalnya MMP hanya dimaksudkan sebagai wadah pertemuan kelompok Muslim, namun dalam perjalanannya berubah menjadi organisasi atau lembaga yang bergerak memperjuangkan kepentingan masyarakat Muslim di Papua. Kepentingan masyarakat Muslim sebelumnya diperjuangkan melalui tokoh-tokohnya yang ada di dalam Majelis Rakyat Papua (MRP). Di dalam lembaga tersebut, kelompok Muslim memiliki perwakilan satu orang saja sehingga tidak cukup untuk mewadahi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok Muslim.

Dalam disertasi ini dapat dilihat bahwa MMP berdiri salah satu semangat utamanya adalah media atau sebagai wadah bagi kelompok Muslim Papua yang berasal dari beragama latar belakang etnis dan daerah. Mereka yang terhimpun di dalam wadah MMP ini bukan

hanya Muslim yang berasal dari Papua, tetapi juga Muslim yang datang kemudian menetap di Papua, dalam hal ini Muslim pendatang. Pergeseran peran MMP yang kemudian terlibat dalam politik di tingkat daerah ternyata didorong oleh berbagai kepentingan baik di internal maupun eksternal. Di internal, MMP membutuhkan legitimasi sebagai organisasi yang menjadi 'rumah bersama' kelompok Muslim yang berasal dari berbagai latarbelakang. Sementara itu, pada dinamika politik Papua yang sangat dinamis, MMP dibutuhkan dalam rangka menjadi 'jembatan' antara kelompok Muslim dengan aktor lain seperti pemerintah daerah, partai politik, tokoh adat, tokoh agama, dan lain-lain sehingga nilai tawar Muslim semakin kuat.

Secara kelembangaan, MMP dibutuhkan untuk mewakili Muslim dalam berbagai kepentingan dan kesempatan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa, *pertama*, dalam proses eksternalitas bahwa motif dibentuknya MMP memiliki dua makna atau tujuan. Selain sebagai wadah *silaturrahim* yang mempersatukan kelompok Islam, juga merupakan media atau saluran perjuangan bagi kelompok Muslim. Kepentingan-kepentingan sosial politik kelompok Muslim terwadahi melalui MMP, termasuk negosiasi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam banyak kesempatan, MMP tampil sebagai simbol kelompok Muslim, bahkan melakukan penolakan-penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dianggap diskriminatif.

Kedua, keberadaan MMP di Papua berdampak pada konsepsi terhadap Muslim itu sendiri. Muslim yang diidentikkan dengan Indonesia, bagi banyak kalangan di Papua, berpotensi 'mengganggu' keberlangsungan kekuasaan orang-orang Papua. Sebelum Otonomi Khusus, memang mayoritas posisi strategis di pemerintahan di Papua diduduki oleh Muslim (bukan orang asli Papua). Bahkan, pejabat-pejabat kala itu dihadirkan oleh pemerintah pusat. Artinya, para pejabat tersebut bukan dari orang-orang Papua sendiri. Konstruksi masyarakat Papua terhadap Muslim memang beragam. Sebab, pada salah satu suku asli di Papua, misalnya Dani, memeluk Islam dengan

tetap pada pengaruh adat/tradisi yang masih kuat. Bahkan, Muslim di satu sisi diasosiasikan dengan orang pendatang yang dianggap tidak memiliki 'hak' untuk menduduki posisi-posisi penting di Papua, khususnya di Jayapura. Hal ini dapat dilihat misalnya pada komposisi pejabat di lingkungan pemerintah kota Jayapura yang didominasi oleh Kristen Papua dan Kristen Pendatang.

Ketiga, kiprah politik MMP di masa mendatang masih didominasi oleh politik alokatif dan akomodatif. Muslim meskipun memiliki wadah yang solid seperti saat ini, namun masih harus terus berjuang untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Banyak pihak yang menjadi bagian MMP terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, di internal MMP pun beragam kepentingan, termasuk aspirasi politik. MMP dengan posisi strategis yang menjadi wadah kelompok Muslim akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi khususnya pilkada (Gubernur dan Bupati/Walikota). Secara kuantitas, Muslim khususnya di Jayapura sangat signifikan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi nilai tawar MMP secara kelembagaan.

6.2. Saran/Rekomendasi

Studi ini merekomendasikan beberapa hal penting terkait dengan keberadaan dan kiprah politik MMP di Papua khususnya di Jayapura. *Pertama*, MMP sebagai wadah kelompok Muslim diharapkan mampu mewadahi kepentingan-kepentingan yang menjadi misinya. Oleh karena itu, MMP sebaiknya menjadi lembaga yang terbuka dan berpihak terhadap kebutuhan Muslim yang paling mendesak. *Kedua*, MMP semaksimal mungkin memerankan peran yang strategis dengan membangun komunikasi yang solid baik di internal maupun eksternal. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan peluang pada MMP untuk menunjukkan kontribusinya bagi pembangunan Papua secara keseluruhan. *Ketiga*, lembaga ini setidaknya berkontribusi bagi penciptaan kondisi atau hubungan antar pemeluk agama di Papua semakin baik di masa mendatang. Selama

ini, ketengangan di kalangan pemeluk agama seringkali terjadi khususnya antara Muslim dan Kristen yang dipicu oleh banyak hal, termasuk perebutan sumber daya ekonomi dan politik di Papua khususnya di Jayapura. Oleh karena itu, keberadaan MMP dengan segala kiprahnya baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik serta budaya dapat menjadi media konsolidasi bagi terbangunnya hubungan yang lebih harmonis dan kemajuan Papua secara umum di masa yang akan datang.

Ke depan, masih banyak persoalan yang dapat direspons khususnya oleh para peneliti terkait MMP di Papua, khususnya di Jayapura. Salah satu isu penting yang belum tersentuh secara mendalam, khususnya dalam penelitian ini, adalah upaya MMP secara aktif berjuang dalam politik. Selama ini, MMP telah mampu membuka mata pemerintah daerah bahwa Muslim juga merupakan bagian dari masyarakat Papua. Akan tetapi, hal itu belumlah memberikan akses yang cukup bagi Muslim untuk berkiprah secara maksimal dalam politik lokal (daerah). Persoalan ini dapat dielaborasi lebih mendalam khususnya bagi para peneliti berikutnya.

6.3 Implikasi Teoritis

Identitas seperti yang didiskusikan oleh para ahli merupakan sesuatu yang tidak hanya melekat, tetapi juga merupakan hasil sebuah proses konstruksi. Konstruksi identitas MMP menjadi bagian penting dari proses sosial di Jayapura Papua. Sebelumnya, MMP hanya dipahami sebagai sebuah wadah atau perkumpulan yang menghimpun Muslim Papua, tetapi belakangan ini khususnya setelah otonomi khusus MMP memiliki peran yang strategis karena telah menjadi bagian dari komoditas (politik) elit. Selain itu, MMP tidak hanya pasif dalam proses pembentukan identitasnya, tetapi juga aktif yang dapat dilihat pada berbagai upaya yang dilakukan termasuk melakukan ‘manuver’ dalam politik seperti merekomendasikan Muslim terlibat dalam pemilihan kepala daerah.

Konstruksi sosial sebagaimana yang didiskusikan secara dalam oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman merupakan rangkaian proses atau tahapan yang berkelanjutan. Dalam kasus MMP, konstruksi identitas tidak hanya terjadi secara berkelanjutan tetapi juga selalu melahirkan model-model atau pola-pola identitas di kalangan Muslim Papua yang berdampak pada pengakuan dan penerimaan sosial secara luas. Muslim sebagaimana yang ingin diwujudkan tidak terbatas pada identitas keagamaan orang Papua, tetapi juga identitas kolektif yang mencakup seluruh Muslim yang ada di Papua. Kajian disertasi ini memberikan kontribusi terhadap pola pembentukan identitas yang mengalami pergeseran, namun selalu memperoleh tempat baru di berbagai level sosial.

